



Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Analisis Kritis

Natalia Desripa^{1*}, Guna Raj², Angeline Agnes Leonita³, Christopher Powell⁴, Franklin Fredrick⁵, Felix Ivander Chou⁶, Hendra Choandarta⁷, Jacky Lie⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Manajemen, Universitas Prima Indonesia

^{1*}natalia.desripa@gmail.com, ²gunaraj030106@gmail.com, ³angelinealeo05@gmail.com, ⁴christopherpowell045@gmail.com,

⁵franklin.fredrick006@gmail.com, ⁶felixivander.chou@gmail.com, ⁷hchuandarta@gmail.com, ⁸jackylie101@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

20 Januari 2024

Diterima:

27 Januari 2024

Diterbitkan:

03 Februari 2024

Kata Kunci:

Pandemi Covid-19,
Kemiskinan,
Kesejahteraan Sosial,
Dampak Ekonomi,
Indonesia

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak luas pada Indonesia, terutama terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pembatasan sosial telah diterapkan untuk menekan penyebaran virus, tetapi berdampak pada penurunan pendapatan dan peningkatan tingkat kemiskinan. Proyeksi menunjukkan bahwa hingga jutaan orang bisa jatuh ke dalam kemiskinan baru. Selain itu, pandemi juga meningkatkan masalah kesehatan mental dan gangguan dalam akses terhadap layanan sosial. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis dampak pandemi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya pemerintah melalui bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat telah diambil, tetapi tantangan yang besar masih ada jika pandemi berlanjut. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan dari semua sektor masyarakat sangat diperlukan.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang luas terhadap aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak ekonomi dan sosialnya pun sangat terasa, sehingga pemerintah Indonesia mengambil langkah agresif untuk menekan penyebaran virus. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan pembatasan sosial (social distancing). Pembatasan sosial ini dipilih karena dianggap lebih efektif untuk menekan penyebaran virus tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang terlalu besar. Pembatasan sosial dilakukan dengan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas sosial secara langsung, seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Dengan penerapan pembatasan sosial, diharapkan penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal (World Health Organization [WHO], 2020).

Pandemi ini diperkirakan akan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat kemiskinan. Menurut studi yang dilakukan oleh SMERU Research Institute (2020), dampak paling ringan COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat kemiskinan dari 9,2% pada September 2019 ke 9,7% pada akhir 2020. Hal ini berarti bahwa akan ada 1,3 juta orang yang jatuh miskin. Dalam skenario terburuk, tingkat kemiskinan bisa meningkat menjadi 12,4%, atau 8,5 juta orang akan jatuh miskin. Proyeksi terburuk ini berarti bahwa kemajuan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan selama satu dekade terakhir akan sia-sia. Untuk mengatasi dampak ini, Indonesia perlu memperluas program perlindungan sosialnya untuk membantu kaum miskin, baik yang baru maupun yang telah ada sebelumnya. Program-program ini dapat berupa bantuan tunai, subsidi pangan, dan layanan kesehatan (Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma, 2020).

Pada awalnya, pandemi Covid-19 dianggap sebagai wabah karena hanya menjangkit satu daerah saja. Namun, tingkat penularan virus yang mudah menular membuat manusia merasa cemas. Cemas yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan kecemasan sosial (Brooks et al., 2020). Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor perekonomian, yang menyebabkan banyak perusahaan dan industri mengalami stagnan dalam produksi dan inovasi. Hal ini mengakibatkan adanya kebijakan PHK besar-besaran, yang menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan sosial dapat dilihat dari sisi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pandemi Covid-19 membatasi interaksi sosial, seperti berkumpul, menghadiri acara, dan berwisata. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi sosial (Cacioppo & Cacioppo, 2020).

METODE

Metode deskriptif dalam penelitian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia memungkinkan peneliti untuk secara sistematis menggambarkan dan menganalisis kondisi atau fenomena yang terjadi. Pendekatan ini sangat relevan mengingat pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial-ekonomi yang signifikan, yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kesejahteraan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Menurut Creswell (2014), metode deskriptif memfasilitasi peneliti dalam mengumpulkan data yang dapat menggambarkan situasi yang sedang diteliti tanpa mengubah lingkungan atau kondisi tersebut. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode deskriptif antara lain survei, observasi, dan wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang dampak pandemi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Kothari, 2004).

Dalam konteks pandemi COVID-19, penelitian deskriptif dapat mengidentifikasi bagaimana pandemi mempengaruhi pendapatan rumah tangga, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan dan kesejahteraan. Analisis data yang terkumpul dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemiskinan sebelum dan selama pandemi, serta perubahan dalam indikator kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi saat ini, tetapi juga dapat menginformasikan kebijakan dan intervensi yang diperlukan untuk mengatasi dampak negatif pandemi terhadap masyarakat (Bryman, 2012).

Oleh karena itu, menggunakan metode deskriptif dalam penelitian tentang dampak COVID-19 terhadap kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia memungkinkan peneliti untuk mendokumentasikan secara akurat perubahan yang terjadi dan menyediakan basis data yang kuat untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial pasca-pandemi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Covid -19 di Indonesia

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. COVID-19 bukanlah penyakit global pertama kali yang dihadapi Indonesia. Jauh sebelumnya, tepatnya pada 2003 pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan penyakit SARS, Flu burung dan H1N1. Jika dirunut dari sejarah dan beberapa literatur, Indonesia pernah menghadapi wabah penyakit pada 1900-an saat masih bernama Hindia Belanda. Banyak manuskrip dan testimoni dari berbagai narasumber terakik kejadian Pandemi. Beberapa bukti dari media massa di zaman tersebut yang menguatkan bahwa Covid-19 bukan pandemi pertama bagi Indonesia, di antaranya, *Algemeen Handelsblad* edisi 30 Oktober 1918 dengan judul *Spaansche Griep (Flu Spanyol)*. Kedua, *De Masbode* edisi 7 Desember 1918 dengan judul *Kolonien Uit Onze Oost, De Spaansche Ziekte op Java (Dari Timur Kami, Penyakit Spanyol di Jawa)*. *De Telegraaf* edisi 22 November 1918 yang memuat berita berjudul *De Spaansche Griep op Java (Flu Spanyol di Jawa)*. Masih dari media yang sama, tanggal 5 Februari 1919, menurunkan berita berjudul *De Spaansche Griep op Java de Officieele Sterftecijfers (Angka kematian resmi flu Spanyol di Jawa)*. Keempat, *De Sumatra Post* edisi 11 Desember 1920, menurunkan tulisan berjudul *Influenza*.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat serius pada perekonomian Indonesia, termasuk mengganggu kesejahteraan masyarakat. Pembatasan sosial yang ketat untuk mencegah penularan virus telah menyebabkan aktivitas ekonomi terhenti, yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya daya beli masyarakat. Setelah pengumuman adanya kasus pertama di Indonesia, pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan panic buying. fakta lapangan menunjukkan bahwa penularan virus korona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif Korona mencapai 69 orang, 4 orang di antaranya meninggal dan 5 kasus sembuh. Penanganan cepat diupayakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan covid-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoordinasi tim reaksi cepat. tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala BNPB, Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan covid-19 ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN. Tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Presiden Jokowi. Salah satu isi surat ini adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat menghadapi Covid-19 melalui deklarasi darurat nasional. Tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Hingga akhir Maret 2020, kasus positif covid-19 di Indonesia terus meningkat. Pada tanggal 27 Maret 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah pasien positif covid-19 mencapai 1.406 orang.

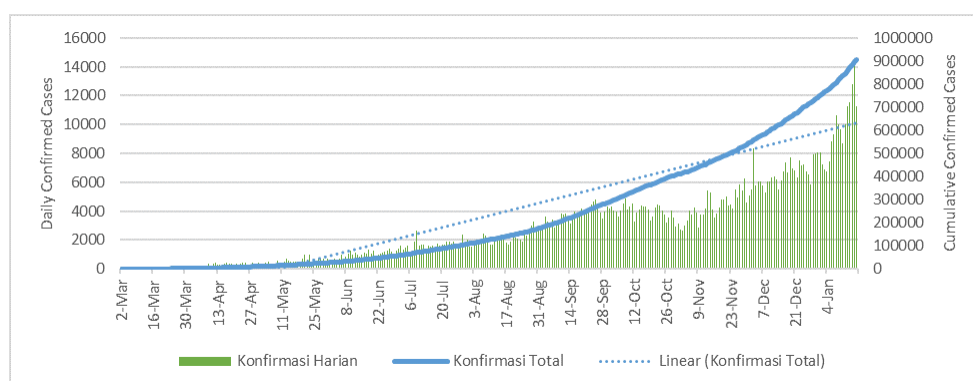
Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam

Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Provinsi pertama yang mengajukan PSBB adalah DKI Jakarta, yang menjadi wilayah terdampak korona paling tinggi. Pengajuan PSBB DKI Jakarta disetujui oleh Menteri Kesehatan Agus Terawan dengan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditandatangani tanggal 7 April 2020.

Memasuki bulan Mei, penanganan covid-19 mendapat tantangan besar. Pasalnya, tanggal 24-25 Mei 2020 merupakan Hari Raya Idul Fitri. Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik pada kesempatan itu. Padahal, pemberlakuan PSBB di beberapa daerah belum bisa dicabut sebab kasus positif covid-19 belum menunjukkan penurunan. Selain seruan larangan mudik, sejumlah daerah yang belum menerapkan kebijakan PSBB mulai menerapkan kebijakan tersebut. Hingga akhir Mei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan sudah ada 29 wilayah yang menerapkan PSBB yang terdiri atas 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Tidak bisa dimungkiri dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mandeg. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0 persen pada 2020. Bahkan, dalam skenario terburuk bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5 persen. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial, tanggal 27 Mei 2020 dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tananan normal baru. Demi memperkuat pedoman bagaimana masyarakat dalam situasi normal baru, Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan normal baru ini diharap berbarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab covid-19 belum sepenuhnya sirna. Sampai saat ini, 18 Januari 2021 jumlah kasus di Indonesia terus meningkat tercatat 907.929 kasus dan 25.987 meninggal. Berikut sebaran kasus dari tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 18 Januari 2021



Gambar 1. Perkembangan Kasus Harian COVID-19 di Indonesia

Ketika rumor dan ditemukan beberapa kasus di beberapa negara, Indonesia telah mengaktifkan Sistem Kewaspadaan Dini dipintu masuknya Negara teaptnya sejak 6 Januari 2020, selanjutnya pedoman kesiapsiagaan di dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2020 dan tanggal 4 Februari 2020 Menteri Kesehatan mendeklarasikan NCoV 2019 sebagai Emerging Infeksi Diseases yang Menyebabkan wabah. Pernyataan ini mengandung arti sesuai peraturan yang ada, segala upaya seperti pada kejadian wabah dapat dilaksanakan, misalnya mengkarantina, melakukan pembatasan dan lain-lain. Awal Maret 2020, tepatnya tanggal 2 Maret, Indonesia melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19, diawali dengan kontak dengan kasus dari luar Indonesia, 10 hari setelah merasakan gejala batuk, demam dan sesak pasien ditetapkan suspek oleh salah satu RS Swasta dan dirujuk ke RSPI 3 (Rumah sakit Sulianti Saroso) Rumah sakit infeksi penyakit menular, 1 Maret dilakukan pengambilan specimen terhadap kasus dan kontak. Tanggal 2 Maret Presiden Menyatakan kedua kasus positif Corona Wuhan. Hasil investigasi oleh dinkes menemukan setelah kemkes mendapatkan informasi adanya warga Jepang yang positif dan berhubungan dengan 2 kasus yang ada di Indonesia. Ada 7 komponen dalam pengendalian pandemic yaitu : Koordinasi, Surveilansi, deteksi, pelayanan Kesehatan, Logistik, SDM, informasi dan komunikasi, 2 Maret 2020, dibentuk Satgas Nasional Percepatan penanganan COVID-19 tentunya untuk memperkuat koordinasi, Surveilans dan deteksi dini melibatkan Tim gerak Cepat yang ada diseluruh Kab/ Kota, Unit pelaksana teknis dan RS Dan pemenuhan anggaran layanan Kesehatan, logistik SDM dan Informasi dan Komunikasi Diawal kasus, beberapa komponen dapat bekerja optimal, namun beberapa komponen logistic dan informasi dan komunikasi masih menemui tantangan. Hal ini berlanjut seiring bertambahnya kasus seperti di grafik, Ketika kasus sudah mulai meningkat komponen

(system) mulai menurun performasnya, logistik khususnya APD sulit ditemukan, surveilans (kontak tracing) tidak maksimal, deteksi kasus di lab membutuhkan waktu yang cukup lama, SDM dirasakan kurang di. Beberapa pelayanan Kesehatan, begitu juga dengan pelayanan Kesehatan kebutuhan tempat tidur dan ICU meningkat. Saat ini, kita sudah tersedia 566 jejaring lab, 922 RS rujukan, 13.000 tenaga sukarela namun tantangan masih dirasakan terkait pelayanan Kesehatan (tempat tidur dan ICU). Upaya penting saat ini yang dilakukan adalah vaksinasi dan telah dimulai dengan vaksinasi ke Presiden RI 15 Januari 2021.

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara ini mengalami kontraksi dramatis sebesar -5,3% pada kuartal II tahun 2020, sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sejak krisis keuangan Asia. Dampak ini terasa di seluruh komponen perekonomian, baik dari sisi permintaan seperti konsumsi masyarakat maupun penawaran. Sektor-sektor yang paling terdampak mencakup manufaktur, perdagangan, transportasi, serta industri akomodasi, restoran, dan perhotelan. Banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terpaksa menghentikan operasi mereka, menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban kredit, sementara perusahaan-perusahaan besar mengalami gangguan arus kas, penurunan kinerja bisnis, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan menghadapi ancaman kebangkrutan. Lebih jauh, sektor keuangan dihadapkan pada potensi masalah likuiditas dan insolvensi.

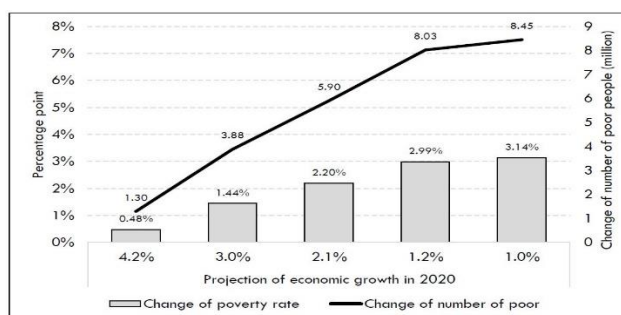
Dampak pandemi ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi makro dan korporasi, tetapi juga sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Mereka menghadapi ancaman kesehatan langsung dari Covid-19, kehilangan pendapatan, dan penurunan daya beli yang signifikan. Ancaman-ancaman ini berpotensi menambah jumlah pengangguran dan meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia, menggarisbawahi pentingnya intervensi dan dukungan yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh individu dan keluarga di seluruh negeri selama masa krisis ini.

Pandemi COVID-19 dan Munculnya Orang Miskin Baru

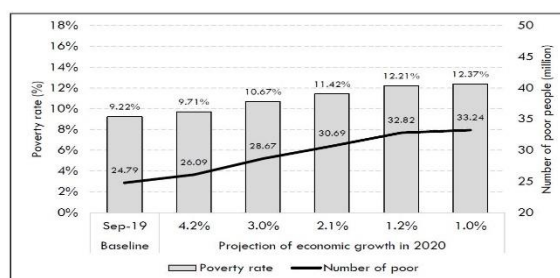
Dampak pandemi COVID-19 pada aktivitas perekonomian diprediksi akan berlangsung cukup lama. Jika hal ini terjadi, kemungkinan besar masyarakat dunia akan mengalami resesi atau krisis ekonomi yang parah. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 akan turun hingga -3%. Resesi ini akan mendorong munculnya orang miskin baru. Hasil studi Sumner, Hoy, dan Oritz-Juarez (2020) yang mencakup 138 negara berkembang dan 26 negara berpendapatan tinggi menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 akan memunculkan sekitar 85 juta orang miskin baru. Bagaimana dengan Indonesia? Bank Dunia (2020) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya akan mencapai 2,1%. Dalam skenario terburuk, angka proyeksi tersebut bisa turun menjadi -3,5%. Angka tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi pada 2019 yang hanya sebesar 5%. Guncangan ekonomi di Indonesia juga diprediksi akan mendorong munculnya orang miskin baru.

Peneliti melakukan sebuah studi untuk mengestimasi dampak COVID-19 pada tingkat kemiskinan di Indonesia (Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma, 2020). Simulasi tingkat kemiskinan pada 2020 dilakukan dalam beberapa skenario dengan menggunakan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas). Dalam simulasi tersebut kami menggunakan lima proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 dari beberapa lembaga dan hasil studi, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2% (Bank Indonesia), 3,1% (Rogers, 2020), 2,1% (World Bank, 2020), 1,2% (Yusuf, 2020) dan 1% (The Economist Intelligence Unit, 2020). Semua proyeksi tersebut menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2020. Data BPS pun menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 yang hanya sebesar 2,97% (BPS, 2020).

Peneliti mengacu pada guncangan ekonomi yang terjadi dalam periode 2005–2006 sebagai tolok ukur dalam melakukan simulasi. Periode tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan, pada saat yang sama, tingkat kemiskinan naik. Hasil simulasi dampak pandemi COVID-19 pada tingkat kemiskinan di Indonesia dibagi menjadi tiga skenario berdasarkan tingkat keparahan, yaitu paling ringan, moderat, dan paling berat. Dalam skenario paling ringan, ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,2% dan tingkat kemiskinan akan naik dari 9,2% (angka pada September 2019) menjadi 9,7% pada akhir 2020, atau sekitar 1,3 juta lebih orang akan menjadi miskin. Dalam skenario moderat, ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 2,1% dan tingkat kemiskinan akan mencapai 11,4%, atau akan ada 6 juta orang miskin baru. Dalam skenario paling berat, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 1% dan tingkat kemiskinan akan naik menjadi 12,4%, atau sebanyak 8,5 juta lebih orang akan jatuh miskin.



Gambar 2. Perubahan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin



Gambar 3. Dampak wabah COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin

Jika tingkat kemiskinan sebesar 12,4% benar-benar terjadi, upaya untuk menurunkan-nya akan sangat sulit dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya yang sangat besar dan masif untuk mencapai target RPJMN 2024. Kenaikan tingkat kemiskinan akibat pandemi COVID-19 perlu mendapatkan perhatian serius dari pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia adalah memperkuat program perlindungan sosial untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang menjadi miskin atau makin miskin akibat pandemi COVID-19.

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Sosial

Dampak langsung pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan sosial pertama-tama mencakup penurunan pendapatan. Pandemi telah menyebabkan banyak individu kehilangan pekerjaan atau menghadapi pengurangan jam kerja, yang secara langsung berdampak pada pendapatan mereka. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu, pandemi juga telah meningkatkan tingkat kemiskinan, seperti yang terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selain itu, pandemi juga telah meningkatkan kerentanan sosial dalam masyarakat. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan pergaulan bebas adalah contoh dampak langsung lainnya yang dapat diamati selama pandemi ini.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga memiliki dampak tidak langsung terhadap kesejahteraan sosial. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah kerusakan pada kesehatan mental masyarakat. Stres, kecemasan, dan depresi telah menjadi masalah kesehatan mental yang semakin umum selama pandemi, dengan potensi mengganggu kemampuan individu untuk bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, pandemi juga telah mengganggu akses masyarakat terhadap pelayanan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Penutupan sekolah, terbatasnya akses ke layanan kesehatan, dan kendala dalam mendapatkan bantuan sosial adalah contoh-contoh dampak tidak langsung yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan sosial, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa tindakan. Salah satunya adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, seperti bantuan sosial tunai, bantuan sembako, dan bantuan listrik. Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi pandemi, seperti program pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, juga menjadi fokus penting dalam upaya penanganan dampak sosial pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak serius terhadap kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dampak ekonomi yang signifikan, termasuk kontraksi pertumbuhan ekonomi dan penurunan pendapatan, telah menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan. Proyeksi menunjukkan bahwa hingga jutaan orang bisa jatuh ke dalam kemiskinan baru akibat pandemi ini, terutama jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial, termasuk masalah kesehatan mental, peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan gangguan dalam akses terhadap layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Tindakan pembatasan sosial dan penutupan aktivitas ekonomi telah meningkatkan kerentanan sosial dalam masyarakat.

Untuk mengatasi dampak ini, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah, termasuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan akses terhadap layanan sosial. Namun, tantangan yang besar masih ada, terutama jika pandemi berlanjut dalam jangka waktu yang lama.

Pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta upaya bersama dari semua sektor masyarakat, dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan dan kesejahteraan sosial sangat diperlukan. Upaya ini perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat melewati masa krisis ini dengan lebih baik dan memulihkan ekonomi dan kesejahteraan sosial mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen atas petunjuk yang berharga dan bimbingan mendalam dalam menyusun jurnal ini. Bimbingan Anda telah membantu saya memahami konsep-konsep yang kompleks dan merumuskan ide-ide dengan lebih jelas. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan masukan selama tahap diskusi dan penulisan artikel ini. Kritik dan saran yang diberikan sangat berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriansyah, M. F. (2022, Desember 28). Pandemi Covid 19 dan Upaya Pencegahan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 2023, November 15, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15799/Pandemi-Covid-19-dan-Upaya-Pencegahan.html>
- Azis, J., & Siregar, M. S. (2022, Januari 5). Kondisi Kesejahteraan Sosial Selama Pandemi COVID-19. FISIP UMSU Terbaik di Medan. Diakses pada 2023, November 15, dari <https://fisip.umsu.ac.id/2022/01/05/kondisi-kesejahteraan-sosial-selama-pandemi-covid-19/>
- Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. *The Lancet*, 395(10227), 912-920. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Cacioppo, J. T., & Cacioppo, S. (2020). Social relationships and health: The toxic effects of perceived social isolation. *Social and Personality Psychology Compass*, 8(2), 58-72. <https://doi.org/10.1111/spc3.12087>
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023, November 15). Penguatan Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian COVID-19. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses pada 2023, November 15, dari <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, November 15). Pengaruh COVID-19 terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 2023, November 15, dari <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/pengaruhcovid>
- Kothari, C.R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Age International.
- SMERU Research Institute. (2020, November 25). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kemiskinan: Estimasi bagi Indonesia. Diakses pada 2023, November 15, dari <https://smeru.or.id/id/publication-id/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-kemiskinan-estimasi-bagi-indonesia-0>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The impact of COVID-19 on poverty in Indonesia. SMERU Research Institute. <https://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-poverty-indonesia>
- Widiyani, R. (2020, Maret 18). Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan hingga Isu Terkini. DetikNews. Diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini>
- World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Retrieved from <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
- Yayasan BaKTI. (2023, November 15). Estimasi Dampak Pandemi COVID-19 Pada Tingkat Kemiskinan di Indonesia. BaKTINews - Yayasan BaKTI. Diakses pada 2023, November 15, dari <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/estimasi-dampak-pandemi-covid-19-pada-tingkat-kemiskinan-di-indonesia>